

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada penyusunan penelitian skripsi, penulis mengambil topik besar yaitu Intervensi Turki dalam Sengketa Siprus (2016-2021) yang merupakan sengketa wilayah yang belum terselesaikan sejak dimulainya konflik dari setengah abad yang lalu. Dalam penelitian ini, penulis secara spesifik memfokuskan pada alasan intervensi yang dilakukan oleh Turki dalam sengketa tersebut. Penulis juga akan menjelaskan sejauh mana intervensi yang dilakukan oleh Turki dalam Sengketa Siprus. Penulis memilih judul dan topik tersebut adalah dikarenakan Sengketa Siprus merupakan isu keamanan strategis yang masih belum terselesaikan meskipun sudah melalui upaya reunifikasi, resolusi konflik, dan mediasi menuju perdamaian. Selain itu, Sengketa Siprus merupakan isu yang jarang sekali dibahas dalam konteks isu hubungan internasional, padahal isu sengketa wilayah merupakan isu yang masih relevan untuk dikaji lebih dalam sebagai tugas akhir.

### **1.1. Latar Belakang**

Turki merupakan negara berdaulat yang terletak dipersilangan antara benua Asia dan Eropa, letaknya yang strategis menjadikan Turki sebagai salah satu negara terkuat di Timur Tengah khususnya di Laut Mediterania. Sebagai negara yang memiliki kekuatan besar, Turki seringkali menjadi negara yang cukup agresif dalam merefleksikan kebijakan politik luar negerinya, salah satu bukti keagresifan Turki adalah dengan keterlibatannya dalam Sengketa Siprus. Sedangkan Republik Siprus adalah negara kecil di Laut Mediterania yang memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1960 setelah menjadi wilayah di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman pada periode sebelum Perang Dunia I dan wilayah kekuasaan Britania pada periode Perang Dunia II dan Perang Dingin.

Saat ini, Siprus merupakan negara yang sangat strategis karena terletak di persimpangan Laut Mediterania yang merupakan jalur utama perdagangan di Eropa, Afrika dan Asia melalui Laut Mediterania sampai ke Terusan Suez. Siprus berbatasan dengan Turki di utara, Lebanon, Suriah di barat, Mesir di selatan, Israel di tenggara, dan Yunani di barat laut. Tak heran jika Siprus merupakan negara yang sangat strategis di Laut Mediterania. Penduduk Siprus terbagi menjadi dua kelompok etnis, yaitu Siprus Yunani yang menduduki selatan dan Siprus Turki di utara. Selain letaknya yang strategis, Siprus juga memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti gas dan minyak di lepas pantai Siprus. Ini adalah awal dari sengketa Siprus oleh Turki (Harris, 2021).

**Gambar 1.1.1 Peta Siprus secara De Facto**



Sumber: Wonder Why Youtube Channel

Gambar di atas menunjukkan wilayah Siprus secara utuh. Namun, jika peta tersebut di lihat saat ini, wilayahnya terbagi menjadi dua yaitu wilayah yang berwarna merah merupakan RoC, dan wilayah yang berwarna putih merupakan TRNC yang di dukung oleh Turki. Sebelum terjadinya sengketa wilayah, pada awalnya konflik di Siprus merupakan konflik yang disebabkan oleh perbedaan identitas politik antara penduduk Siprus yang ber etnis Yunani dan etnis Turki. Sebelum Turki terlibat dalam konflik internal Siprus, Yunani terlebih dahulu mengambil langkah untuk mendukung gerakan irredentisme yang dilakukan oleh Enosis dalam konflik etnis tersebut. Kemudian, keterlibatan Yunani menarik Turki untuk terlibat dalam konflik tersebut dengan melakukan intervensi pada 1974.

Konflik ini menarik perhatian Turki sebagai pewaris Kekaisaran Ottoman yang pernah menguasai seluruh wilayah Siprus di masa lalu. Turki mengambil kesempatan untuk mencapai kepentingan mereka di Siprus melalui konflik dengan memberikan dukungan kepada etnis Turki Siprus untuk menyebarkan pengaruh dan kekuasaan Turki sesuai dengan misi Presiden Erdogan “*Make Turkey Great Again*” (Cagaptay, 2019). Beberapa peneliti sebelumnya menjelaskan mengenai Intervensi Turki di Siprus Utara dan upaya reunifikasi Siprus, tetapi, penelitian ini akan membahas dinamika keterlibatan Turki dalam sengketa dan implikasinya terhadap Politik Luar Negeri Turki dalam kurun waktu 5 tahun dari 2016 – 2021.

Aktor yang terlibat dalam konflik ini adalah Turki dan Siprus. Keduanya merupakan aktor utama karena terlibat langsung dalam konflik. Sementara itu, ada aktor lain yaitu Republik Turki Siprus Utara (TRNC) yang merupakan hasil invasi Turki ke Siprus dan

memisahkan Republik Siprus menjadi dua bagian Siprus Selatan yaitu Republik Siprus dan Siprus bagian Utara yaitu TRNC. TRNC adalah bagian dari Republik Siprus sebelum Turki melakukan invasi militer ke konflik dan berhasil menempati 35% wilayah utara. Pada tahun 1984, Turki mendeklarasikan TRNC secara sepihak, dan saat ini hanya Turki yang mengakui keberadaan TRNC. Konflik ini melibatkan aktor yang muncul sebagai pemeran utama dan penyebab konflik yaitu Siprus Turki yang telah memberikan bantuan oleh Turki untuk memperkuat kehadiran Turki di TRNC. Dengan itu, Turki menjadi penyebab utama sengketa Siprus dan memisahkan Siprus dari wilayahnya (Hadjipavlou, 2007).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Apa Alasan Intervensi Turki dalam Sengketa Siprus?”**

## **1.3. Landasan Teori**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, keterlibatan Turki dalam Sengketa Siprus memiliki makna lain melalui kebijakan politik luar negerinya. Oleh karena itu, penulis mencoba menjawab permasalahan tersebut menggunakan Teori Kebijakan Politik Luar Negeri sebagai konsep yang relevan untuk menjelaskan permasalahan tersebut.

### **1.3.1. Konsep Intervensi**

Untuk menganalisis keterlibatan Turki dalam sengketa Siprus, konsep intervensi menjadi konsep yang tepat untuk menjelaskan mengapa Turki melakukan intervensi pada konflik ini. Jika didefinisikan secara sederhana, intervensi merupakan tindakan eksternal yang dapat mempengaruhi urusan dalam negeri negara berdaulat lainnya (Nye & Welch, 2017). Intervensi juga dapat menjelaskan cakupan yang lebih luas seperti rangkaian perilaku, dari yang tidak terlalu memaksa atau *low coercion* hingga yang sangat koresif atau *high coercion*.

Dalam membagi tingkat intervensi, *low coercion* terdiri dari: *Speech; Broadcast; Economic Aid; Military Advisor*; dan, *Support Opposition*, sedangkan *high coercion* terdiri dari: *Blockade; Limited Military Action*; dan *Military Invasion* (Nye & Welch, 2017). Intervensi diartikan sebagai proses perpindahan kekuatan atau pasukan negara merdeka ke dalam wilayah darat maupun perairan teritorial negara merdeka lain, atau tindakan militer paksa oleh pasukan yang sudah ditempatkan oleh suatu negara di dalam negara lain dalam konteks isu politik atau sengketa. Intervensi yang terjadi dalam isu sengketa dapat berdampak terhadap struktur otoritas negara target (mendukung atau menentang pemerintah atau kelompok pemberontak), kebijakan dalam atau luar negeri, atau kondisi dalam negeri (Pearson

& Baumann, 2008). Intervensi akan terus berlanjut selama tindakan militer oleh intervensi tersebut dilaporkan atau status intervensi telah berhasil mengambil alih kendali sebagian negara yang didudukinya.

Jika intervensi militer semakin hari semakin meningkat secara signifikan, seperti serangan bersenjata, dan pelanggaran hak asasi manusia maka intervensi tersebut dapat dibalas oleh negara yang bersangkutan (Pearson & Baumann, 2008). Contoh lain dari intervensi adalah pendaratan pasukan militer di negara asing, mengirimkan pasukan melintasi perbatasan, propaganda, spionase, kebijakan pengakuan diplomatik, kebijakan diskriminatif, subversi, atau dukungan atau penolakan apapun kepada pemerintah yang menentang oposisi mereka dalam krisis domestik negara yang di intervensi (Nye & Welch, 2017).

Berdasarkan penjelasan konsep intervensi, kita dapat melihat bahwa cara konvensional dalam memahami intervensi mengedepankan asumsi-asumsi ruang politik yang konstan. Intervensi diasumsikan terjadi dalam tatanan internasional yang terstruktur dan terencana oleh prinsip kedaulatan, dimana unit analisis nya adalah negara-negara berdaulat, dan di mana praktik intervensi dipahami sebagai pelanggaran hak kedaulatan suatu negara (Wallenstein, 2002) (Smit, 2013). Konsep intervensi digunakan dalam skripsi ini untuk menganalisis dinamika keterlibatan Turki dalam sengketa Siprus dengan melakukan aksi militer di TRNC.

### **1.3.2. Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri**

Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri merupakan satu dari teori dasar untuk menganalisis bagaimana perilaku aktor dalam hubungan internasional. Suatu negara akan mempertimbangkan kebijakan politik luar negeri nya berdasarkan apa yang menjadi kepentingan nasional nya (Coplin W. , 1992). Teori ini mampu menjelaskan alasan dibalik pengambilan keputusan luar negeri oleh negara. Maka dari itu penting diketahui pengertian politik luar negeri terlebih dahulu dalam mengidentifikasi kebijakan politik luar negeri.

Menurut Coplin, Politik luar negeri berisi sejumlah aktivitas yang bisa diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kebijakan umum, keputusan-keputusan administratif, dan keputusan-keputusan kritis (Coplin W. , 1992). Politik luar negeri yang bersifat umum terdiri atas serangkaian keputusan yang satu sama lain hanya terkait secara tidak langsung. Politik luar negeri yang bersifat umum terdiri atas serangkain keputusan yang diekspresikan melalui pernyataan-pernyataan kebijakan dan tindakan-tindakan langsung.

Keputusan-keputusan politik luar negeri yang bersifat administratif dibuat oleh para pejabat yang lebih rendah menyangkut kondisi-kondisi spesifik yang dibatasi oleh lingkup,

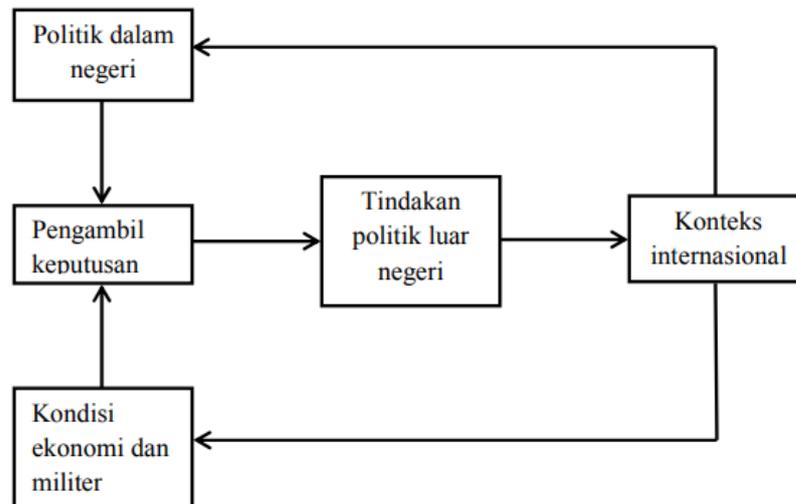
ruang, dan waktunya. Selanjutnya, keputusan-keputusan politik luar negeri yang bersifat krisis biasanya menyangkut kondisi-kondisi khusus yang membawa konsekuensi jangka panjang. Jika dilihat dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Turki mengambil keputusan untuk terlibat pada sengketa Siprus merupakan keputusan yang kritis. Teori Pertimbangan Politik Luar Negeri menjelaskan secara spesifik faktor apa saja yang dapat mempengaruhi suatu negara mempertimbangkan kebijakan politik luar negerinya termasuk dalam pengambilan keputusan untuk merefleksikan politik luar negerinya dalam konteks internasional (Coplin W. D., 2003). Dalam bukunya, Coplin menyatakan :

Apabila kita mempertanyakan mengapa negara berperilaku seperti itu, maka kita harus mempertanyakan mengapa para pemimpin negara tersebut membuat keputusan seperti itu. Akan tetapi, salah besar apabila kita menganggap bahwa para pengambil keputusan politik luar negeri bertindak sembarangan. Akan tetapi, sebaliknya, tindakan politik tertentu mungkin bisa dipandang sebagai akibat dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri; kedua, kemampuan ekonomi dan militer; dan ketiga, konteks internasional, yaitu posisi khusus negara dalam hubungan negara lain dalam konteks itu (Coplin W. D., 2003).

Coplin juga menjelaskan bahwa kebijakan politik luar negeri dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan, yaitu kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer dan konteks internasional. Dengan mengamati pertimbangan di atas, alasan ditetapkan nya politik luar negeri suatu negara dapat dijelaskan. Namun, perlu diketahui bahwa setiap pertimbangan hanya mempengaruhi secara parsial, sehingga setiap pertimbangan bukanlah faktor tunggal terhadap terbentuknya kebijakan luar negeri. Selain pertimbangan tersebut, faktor-faktor lain juga mempengaruhi terbentuknya kebijakan luar negeri tersebut.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai teori ini, William D. Coplin menjelaskan melalui gambar berikut ini (Coplin W. D., 2003) :

**Gambar 1.3.1 Proses Pengambilan Keputusan William D. Coplin**



Sumber : William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis  
(Coplin W. , 1992)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa, pengambil keputusan mempertimbangkan politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional dalam membuat kebijakan politik luar negerinya. Sehingga, kebijakan yang diambil suatu negara bukan semata-mata keinginan pribadi dari pengambil keputusan, namun merupakan hasil dari pertimbangan terhadap tiga consideran tersebut. Namun, pengambil keputusan memegang peran paling penting karena memiliki kewenangan dalam menyetujui kebijakan luar negeri. Faktor politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional memiliki kemampuan untuk mempengaruhi.

Untuk mengimplementasikan teori pengambilan keputusan pada intervensi Turki dalam Sengketa Siprus, maka dapat dijelaskan bahwa Sengketa Siprus yang merupakan konteks internasional menarik perhatian Turki untuk terlibat dalam sengketa. Hal ini dikarenakan Turki tergabung ke dalam TOG untuk mengamankan Siprus dari perpecahan. Selanjutnya, Sengketa Siprus merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri Turki untuk melindungi etnis Turki di pulau Siprus dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh etnis Yunani. Keputusan politik luar negeri Turki untuk terlibat dalam sengketa juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Turki yang maju, terlebih sejak ditemukannya migas di lepas Pantai Siprus, Turki melihat potensi ekonomi yang besar untuk terlibat dalam eksplorasi. Intervensi Turki dalam sengketa didukung dengan kekuatan militer yang kuat sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan Turki terkesan agresif.

#### **1.4. Hipotesa**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipertanyakan, alasan Turki melakukan intervensi militer dalam Sengketa Siprus adalah sebagai berikut.

1. Demi melindungi *Turkish Cypriot* dari segala bentuk pelanggaran akibat konflik.
2. Ingin mempertahankan wilayah pengaruhnya di Siprus.
3. Melanjutkan Eksplorasi SDA di wilayah Siprus.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sekumpulan Teknik tertentu yang digunakan dalam suatu penelitian untuk memilih kasus, mengukur dan mengamati kehidupan sosial, mengumpulkan dan menyempurnakan data, menganalisis data dan melaporkan hasilnya (Laurence, 2008). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2004). Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder yang berasal dari buku, artikel jurnal, dokumen UNFICYP, berita dan media internet. Data yang diambil bersifat deskriptif dan dikembangkan lagi sesuai kebutuhan konteks pembahasan.

#### **1.6. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan studi literatur dan memperkaya kajian di kawasan strategis seperti studi Kawasan Eropa, Timur Tengah, dan studi keamanan internasional.
2. Mengkaji isu strategis yang masih jarang untuk di analisis

#### **1.7. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai Keterlibatan Turki dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Siprus hanya akan membahas dalam kurun waktu 5 tahun yang terhitung sejak 2016 – 2021.

Meskipun analisis ini memfokuskan pembahasan yang dimulai sejak 2016 – 2021, tidak menutup kemungkinan bahwa urutan peristiwa dan latar belakang sejarah dari awal terjadinya sengketa menjadi sumber yang penting untuk menjelaskan mengapa akhirnya peristiwa dalam jangkauan pembahasan bisa relevan dan dapat dibuktikan kebenarannya.

## **1.8. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika penulisan yang dimulai dari Bab I (Pendahuluan) yang berisi Latar Belakang Sengketa, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab II (Sengketa Siprus Dalam Konteks Internasional) Bab ini akan menjelaskan Kronologi Terjadinya Sengketa, dan Sengketa Siprus Sebagai Isu Internasional. Bab III (Alasan Turki Terlibat Dalam Sengketa Siprus) Pada bab ini, penulis akan menjelaskan Perlindungan Etnis Turki di Siprus, Komitmen Turki sebagai Anggota TOG, dan Eksplorasi Sumber Daya Alam Siprus. Bab IV (Kesimpulan) Pada bab ini, penulis menyampaikan kesimpulan dari penelitian yang berisi rangkuman penelitian yang tertuang pada semua bab, serta memberikan saran.